

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH
KOTA DUMAI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKIP ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Sekretariat Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S. IP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651007 198603 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	9
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	16
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024	26
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	28
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	31
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra.....	39
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional	42

3.5	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi.....	44
3.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	50
3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
3.8	Prestasi dan Penghargaan.....	55
BAB IV PENUTUP		57
KESIMPULAN		57
LANGKAH PERBAIKAN / SARAN		58

DAFTAR TABEL

Halaman

2.2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026	18
2.3.1	Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2024	19
2.3.2	Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai	22
2.4.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	23
2.4.2	Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	24
2.4.3	Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	25
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
3.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	28
3.1.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	32
3.4.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	43
3.6.1	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	51
3.7.1	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
3.3	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024.....	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai	4
1.5.1 Cascading	6
1.5.2 Pohon Kinerja	8
1.6.1 Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kota Dumai	9
2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai.....	15

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana Peraturan WaliKota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis Sekretariat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan:
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Sekretariat Daerah Kota Dumai melaksanakan keempat MISI yang ada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri;
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Daerah
2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu;
Sasaran : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai
3. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas;
Sasaran : Meningkatkan Infrastruktur Kota

4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tujuan Strategis Organisasi :

1. Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah
2. Menjadikan BUMD yang mandiri dan Profesional
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ
4. Meningkatkan kerjasama daerah dengan Institusi Pendidikan
5. Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Dumai 2021–2026 telah menetapkan 6 (enam) Tujuan dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Dumaidalam menyukkseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 70 (tujuh puluh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SKPD

- Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

11. Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana
- Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
- Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

- Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
- Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
- Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi SDA

- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup
- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Energi

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel I
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 3. Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga	9 15
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	50
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33.3
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	3

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp106.997.624.903,- *Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*) untuk melaksanakan 3 (tiga)

Program Kerja antara lain :

Tabel II
Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.511.113.503,00,-	Pendapatam Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 61.475.119.300,00,-	Dana Bagi Hasil
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.011.392.100,00,-	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp 106.997.624.903,00,-	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III
Perubahan Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 61.938.422.581,00,-	Pendapatam Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 73.615.619.872,99,-	Dana Bagi Hasil

3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 3.520.992.100,00,-	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 139.075.034.553,99,-	

Sekretariat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	9	7	77,77%	√			
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga	15	15	100%	√			
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	100%	√			
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	50	70	140%	√			

4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5	5	100%	√			
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33,33	33,33	100%	√			
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur organisasi yang dilakukan penataan	3	4	133%	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai selama Tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) yaitu Sangat Berhasil Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.106.997.624.903,- (*Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*) bersumber dari Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH).Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 105.024.516.892,- (*Seratus Lima Milyar Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.973.108.011,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Sebelas Rupiah*).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	105.024.516.892,-
2.	Belanja Modal	:	Rp.	1.973.108.011,-
	Jumlah	:	Rp.	106.997.624.903,-

Sedangkan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel V
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	realisasi(Rp)	Capaian anggaran (%)
1	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 380.000.000	Rp 308.670.000	81,23%
2	Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 380.000.000	Rp 308.670.000	82,23%
3	Tercapaiannya Pembinaan BUMD	Peningkatan capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	3	3	Dokumen	Rp 549.992.100	Rp 366.519.300	66,64%
4	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 72.217.000.000	Rp 59.189 221 859	81,96%

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	realisasi(Rp)	Capaian anggaran (%)
5	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 380.000.000	Rp 308.670.000	81,23%
6	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 550.000.000	Rp 484.533.195	88,10%
7	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	6	Dokumen	Rp 750.000.000	Rp 548.812.541	73,18%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Efisiensi penggunaan Sumber Daya
Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	77.77%	81,92%
		1. Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga	100%	81.92%
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	100%	56,68%
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	140%	81,29%
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	100%	81,92%
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	100%	73,04%
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	133%	77,27%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah* tingkat efisiensinya adalah 0,94 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (77,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga* tingkat efisiensinya adalah 2,04 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu tercapainya Pembinaan BUMD* tingkat efisiensinya adalah 1,76 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,68%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa berprestasitingkat* efisiensinya adalah 1,72 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (140%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 5 yaitu Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan* tingkat efisiensinya adalah 1,22 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- f. Pada *Indikator Kinerja Utama 6* yaitu Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah 1,37 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73,04%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- g. Pada *Indikator Kinerja Utama 7* yaitu Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan adalah 1,72 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (133%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,27%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 66 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah:

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah:
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan:
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah di bantu oleh Asisten;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan Kerjasama dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan Kerjasama dan membawahi :

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum
4. Bagian Kerja Sama

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi Pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam dengan membawahi :

1. Bagian Perekonomian
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

4. Bagian Sumber Daya Alam

d. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan yang membawahi :

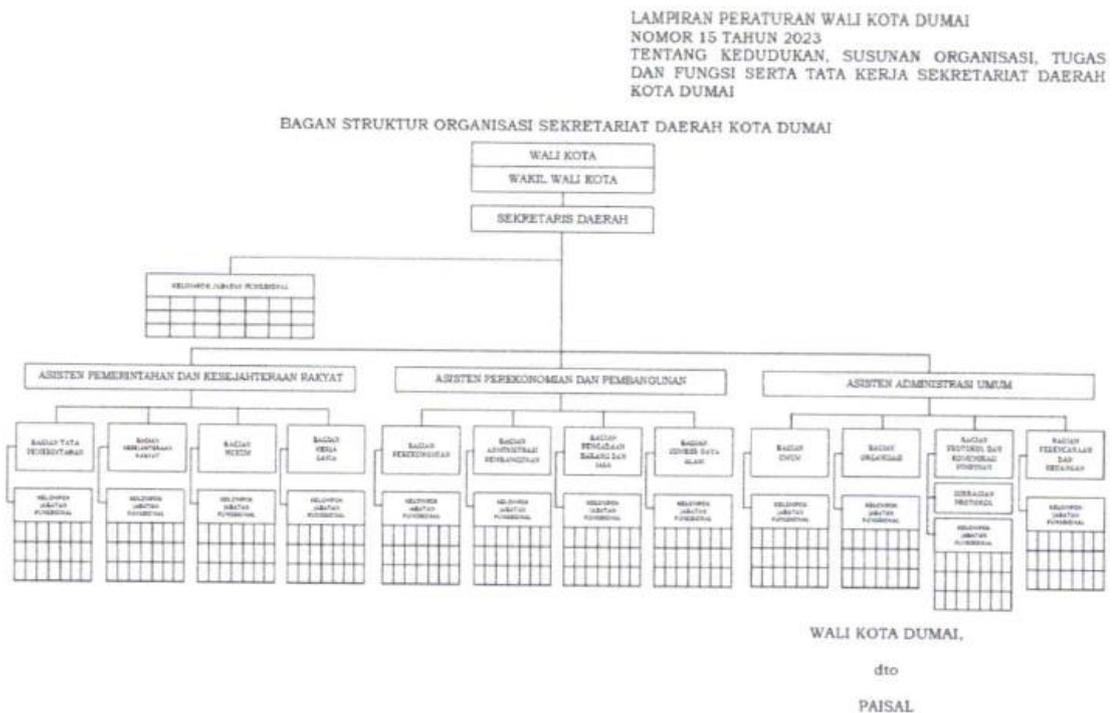
1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama Tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang perlu ditangani sbb:

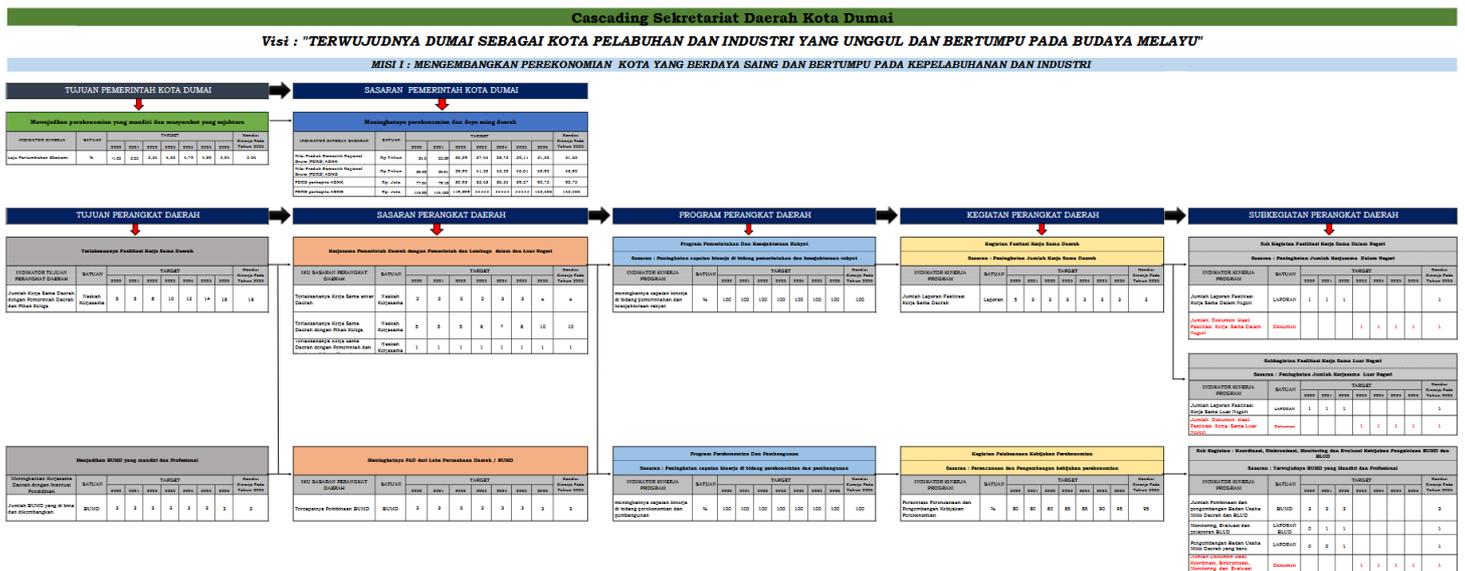
1. Menjadikan BUMD yang mandiri dan Profesional sehingga sebagai salah satu sumber penopang PAD;
2. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam hal pemetaan (Mapping) Potensi Daerah yang dapat dikerjasamakan dan menyesuaikan dengan rencana induk kota sehingga belum optimalnya pelaksanaan Kerjasama daerah sesuai dengan regulasi Kerjasama Daerah;
3. Adanya permasalahan urusan-urusan administrasi pertanahan di Masyarakat karena batas wilayah yang belum jelas;
4. Perlunya meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas sehingga punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ;

- Perlu adanya penataan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.5.1
Cascading

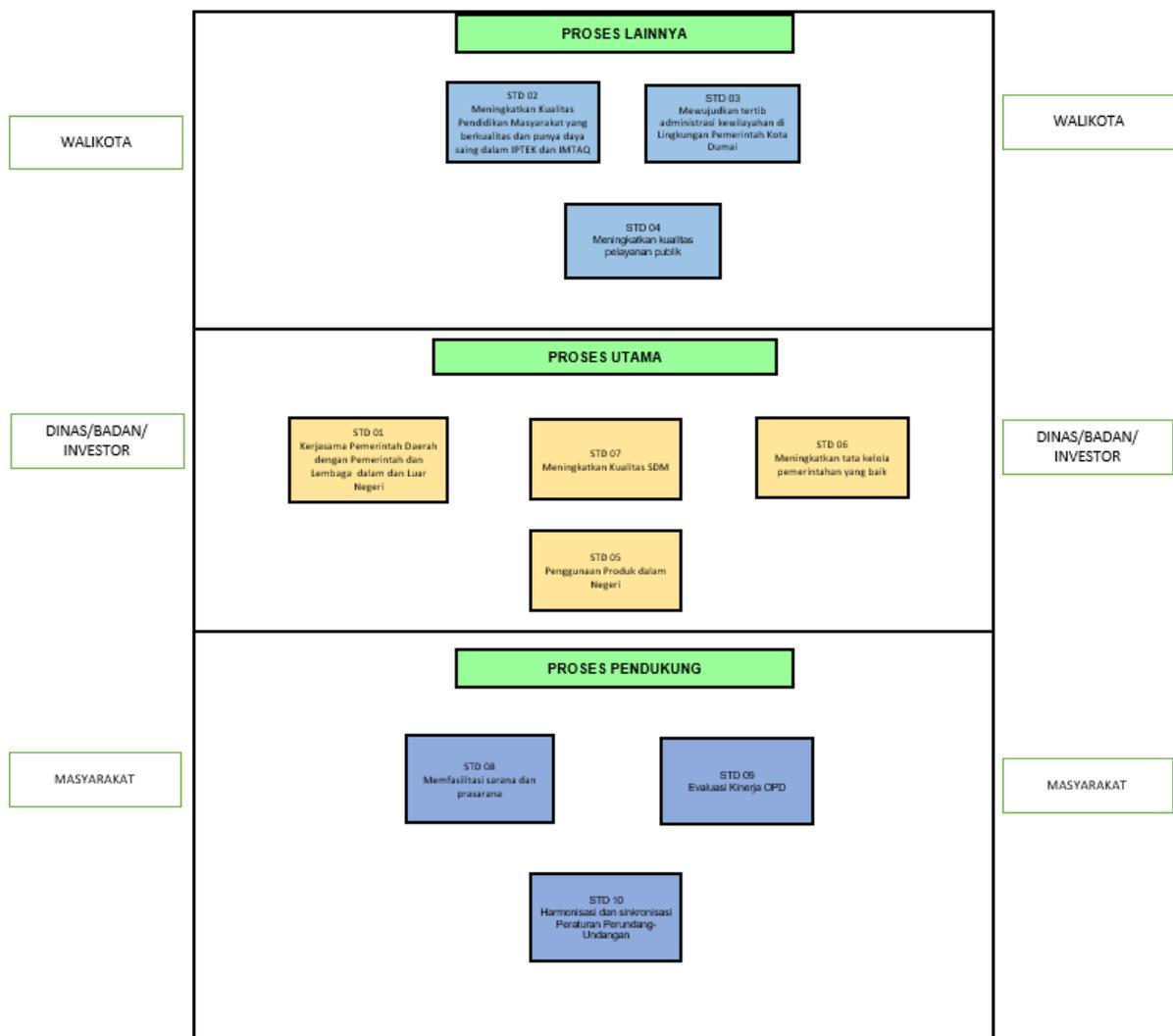


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Sekretariat Daerah sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.6.1

Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kota Dumai



(sesuaikan peta proses bisnis PD masing-masing)

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagaimana

tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1325.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Sekretariat Daerah Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Setiap pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Dumai perlu menetapkan rencana aksi yang mendukung capaian kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tersebut secara berkala	Menghimbau kepada Setiap PNS dilingkungan untuk menyampaikan Rencana Aksi dan Eevaluasi secara berkala	Nota Dinas	Januari 2024	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1LsGq5_aot1S_6bp8yl4cbBqrVHEuZtXCb/view?usp=sharing
2	Sekretariat Daerah Kota Dumai perlu Menyusun mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan Data dan pengukuran kinerja dimasa mendatang	Sekretariat Daerah Kota Dumai telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara Makro yaitu Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dan selanjutnya akan membuat Standar	1 Dokumen	Tahun 2023	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1Lz3xdu_gl0zL_bboZR_A6aB4Aoe6FBTSPz/view?usp=sharing

		Operasional Prosedur (SOP) secara Mikro sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penyusunan Pedoman Umum Penyusunan Standar Operasional Prosedur.					
3	Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Konerjanya (Renstra) dimasa mendatang, Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta penetapan indicator kinerja agar memperhatika n keterkaitannya dengan kebutuhan yang ingin dicapai (konsistensi)	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi dan kebijakan serta penetapan Indikator kinerja akan memperhatikan keterkaitannya dengan kebutuhan yang ingin di capai (Konsistensi dengan isu strategi yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pada Perubahan Renstra 2021- 2026 yang	Perubah an Kedua Renstra Sekretra iat Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026	Februari 2024	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1MFsf3J2F771XJfhU6kpMkmWXo3rCTvr/view?usp=sharing

	dengan isu strategis yang telah di tetapkan.	sednag dalam proses.					
4.	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merukuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integritasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting	Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja akan memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integritasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting. Hal ini dilakukan pada Perubahan Renstra 2021-2026 yang sednag dalam proses.	Perubahan Kedua Renstra Sekretra iat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026	Februari 2024	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Selesai	https://docs.google.com/document/d/1M5fk56rJK-141lwsnfejUwNswVcFqA4/edit?usp=sparing&ouid=106139264121000891955&rt=pofof=true&sd=true
5.	Agar selanjutnya Sekretariat Daerah Kota Dumai memberikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja di level	Sekretariat Daerah Kota Dumai akan memberikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja di level nasional/internasional (Benchmark) dan informasi	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Daumai Tahun 2023	Januari 2024	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1MC2EhLdHBv9UHUTUyLM4JhY7Q5sboA/view?usp=sharing

	<p>nasional/internasional (Benchmark) dan informasi terkait efisiensi penggunaan anggaran/sumber daya dalam rangka penyusunan dokumen laporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Dumai</p>	<p>terkait efisiensi penggunaan anggaran/sumbuer daya dalam rangka penyusunan dokumen laporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Dumai</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Sekretariat Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah : “Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024

yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

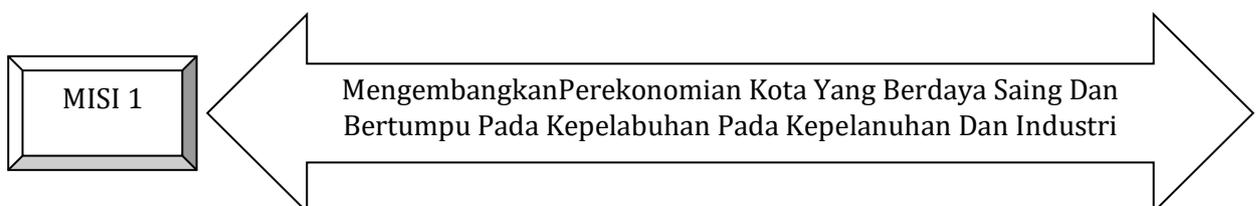
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

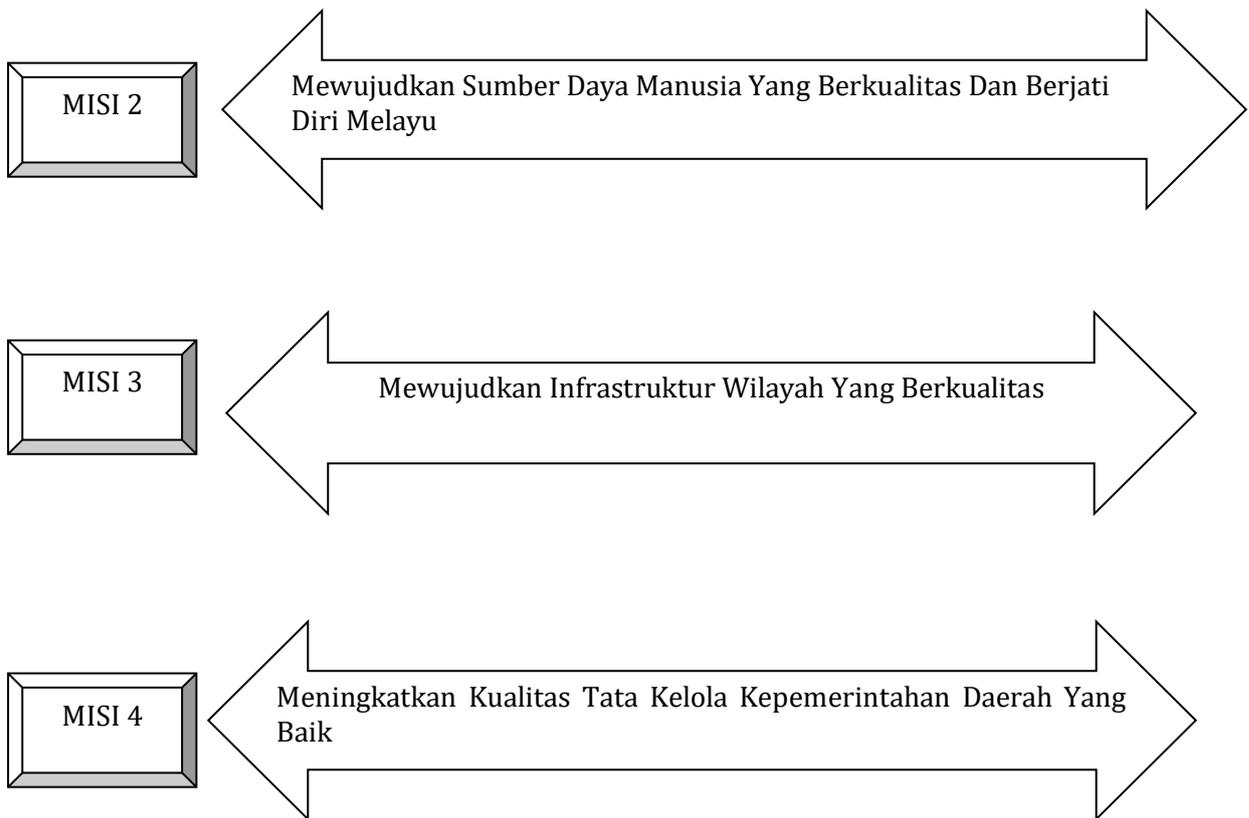
Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

2. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
4. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1.1





2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Sekretariat Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kota Dumai memuat esensi

dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Sekretariat Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU SEKRETARIAT DAERAH		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah		Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah
					Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga
			Menjadikan BUMD yang mandiri dan Profesional	Menghasilkan PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD
Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa prestasi
			Meningkatkan Kerjasama daerah dengan Institusi Pendidikan		
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat pelayanan Infra Struktur Daerah	Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan daerah	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3 1

Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi Ke 1 : Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri	Menetapkan target pelaksanaan Kerja Dalam Negeri
2. Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional	Menghasilkan PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	1. Meningkatkan Pembinaan BUMD; 2. Meningkatkan Kualitas SDM BUMD; 3. Meningkatkan Profesionalisme BUMD	1. Restrukturisasi kepengurusan BUMD 2. Pembinaan Teknis SDM BUMD 3. Pembinaan GCG BUMD
Misi Ke 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu yang berprestasi	Menyediakan dana Beasiswa bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Memberikan Beasiswa bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi
2. Meningkatkan Kerjasama Daerah dengan Institusi Pendidikan	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Melakukan Kerja sama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Misi Ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tertib administrasi kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Menoptimalkan penyelesaian Batas Wilayah antar Kecamatan dan Kelurahan	Membuat target penyelesaian batas antar wilayah pada setiap tahunnya

Misi Ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Perangkat Daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2. Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisiensi 3. Penerapan Sistem Akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Standar Pelayanan Pemerintah; 3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur 4. Melaksanakan

		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah 5. Penerapan hasil Anjab dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 6. Peningkatan Kompetensi Aparatur Penyusunan LKjIP 7. Monitoring dilakukan secara teratur dan dilakukan evaluasi dan koordinasi, apabila kegiatan tidak sesuai spesifikasi dilapangan dengan pengelola kegiatan dan instansi terkait 8. Penerapan instrument-instrumen AKIP
--	--	------------------------------------	---

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 2. Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 3. Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga	9 15
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	50
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33.3
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	3

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran

sebesar Rp106.997.624.903,- Seratus Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2
Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.511.113.503,00,-	Pendapatam Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 61.475.119.300,00,-	Dana Bagi Hasil
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.011.392.100,00,-	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp 106.997.624.903,00,-	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
Program Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 61.938.422.581,00,-	Pendapatam Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan DAU
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 73.615.619.872,99,-	Dana Bagi Hasil
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 3.520.992.100,00,-	Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp.139.075.034.553,99,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Sekretariat Daerah

Kinerjamerupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Sekretariat DaerahKota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabell 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus : } \text{capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian

rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus : Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Terlaksananya Kerjasama antar Daerah

Capaian kinerja untuk indikator terlaksananya Kerja Sama antar Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 9 (Sembilan) Naskah Kerjasama realisasi sebesar 9 (sembilan) Naskah Kerjasama, tercapai 77.77% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Efisiensi Anggaran	81,92%
Nilai Anggaran	Rp. 180.000.000
Capaian 2024	77.77%
Target	9 Naskah Kerjasama.
Realisasi	7 Naskah Kerjasama

b. Indikator Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga

Capaian kinerja untuk indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketigamenunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 15 (lima belas) Naskah Kerjasama realisasi sebesar 15 (lima belas) Naskah Kerjasama, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Efisiensi Anggaran	81,92%
Nilai Anggaran	Rp 180.000.000
Capaian 2024	100%
Target	15 Naskah Kerjasama
Realisasi	15 Naskah Kerjasama

c. Indikator Tercapaiannya Pembinaan BUMD

Capaian kinerja untuk indikator tercapainya pembinaan BUMD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3 (tiga) BUMD realisasi sebesar 3 (tiga) BUMD, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3 (tiga) BUMD atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 samadenagn tahun 2023 sebesar 100%

Efisiensi Anggaran	56,68%
Nilai Anggaran	Rp 178.158.200
Capaian 2024	100%
Target	3 BUMD
Realisasi	3 BUMD

d. Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi

Capaian kinerja untuk indikator jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa beprestasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 50 (lima puluh) Mahasiswa realisasi sebesar 70 (tujuh puluh) Mahasiswa, tercapai 140% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 40 (empat puluh) Mahasiswa atau tercapai sebesar 133%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 7%

Efisiensi Anggaran	81,29%
Nilai Anggaran	Rp 16.967.210.600
Capaian 2024	140%
Target	50 Mahasiswa
Realisasi	70 Mahasiswa

e. Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan

Capaian kinerja untuk indikator jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 5 (lima) Naskah Kerjasama realisasi sebesar 5 (lima) Naskah Kerjasama, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 5 (lima) Naskah Kerjasama atau tercapai sebesar 83%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 17%

Efisiensi Anggaran	81,92%
Nilai Anggaran	Rp 180.000.000
Capaian 2024	100%
Target	5 Naskah Kerjasama.
Realisasi	5 Naskah Kerjasama

f. Indikator Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 33.3% Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan realisasi sebesar 33.3% Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 29.2% Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan tahun 2023 sebesar 100%

Efisiensi Anggaran	73,04%
Nilai Anggaran	Rp 150.000.000
Capaian 2024	100%
Target	33,3 Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan
Realisasi	33,3 Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan

g. Indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan

Capaian kinerja untuk indikator jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3(tiga) Perangkat Daerah realisasi sebesar 4(empat) Perangkat Daerah, tercapai 133% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Efisiensi Anggaran	77,27%
Nilai Anggaran	Rp 150.000.000
Capaian 2024	133%
Target	3 Perangkat Daerah
Realisasi	4 Perangkat Daerah

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

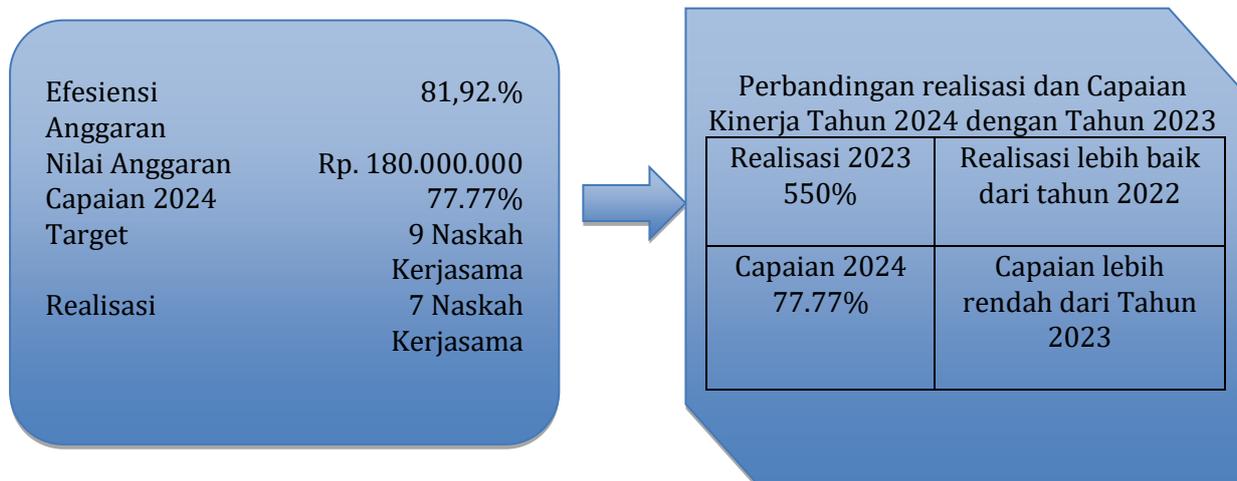
Tabel 3.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah		2	2	9		6	11	7		300%	550%	77.77%
		2. Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga		5	6	-		7	20	-		140%	333%	-
		3. Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga		-	-	15		-	-	15		0%	0%	100%
		4. Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri		1	1	-		0	0	-		0%	0%	
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD		3	3	3		3	3	3		100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi		20	30	50		15	40	70		75%	133%	140%

	kurang mampu yang berprestasi													
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan		5	6	5		2	5	5		40%	83%	100%
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai		25	29.2	33.3		25	29.2	33.3		100%	100%	100%
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan		30	30	-		24	29	-		80%	97%	-
		Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan		-	-	3		-	-	4		-	-	133%

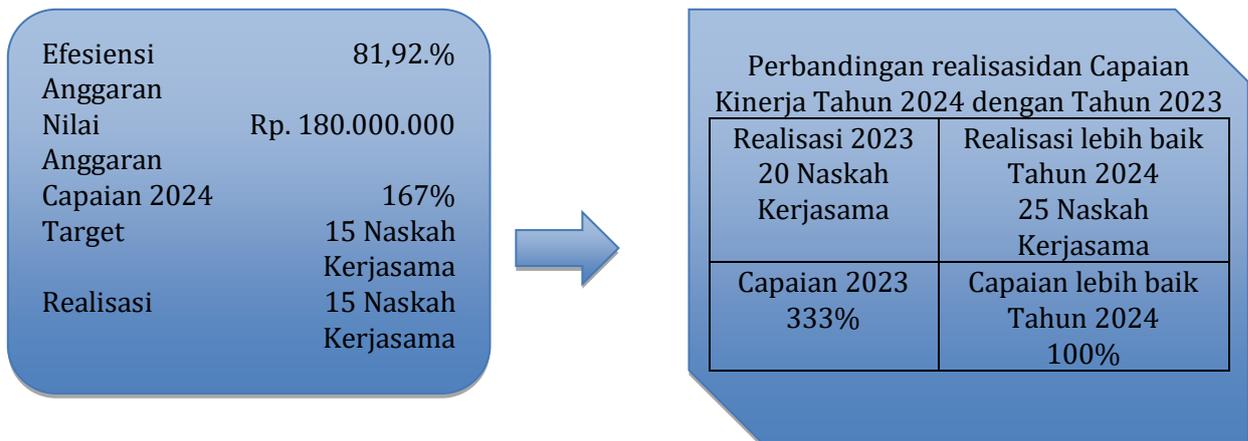
Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Sekretariat Daerah selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah terlaksananya Kerjasama antar Daerah dengan target pada tahun 2022 adalah 2 (dua) Naskah Kerjasama
 - a. Pada tahun 2023 target kinerja tetap 2 Naskah Kerjasama. Realisasi pada tahun 2023 adalah 11 Naskah Kerjasama dengan capaian 550%
 - b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap 2 Naskah Kerjasama. Realisasi pada tahun 2023 adalah 11 Naskah Kerjasama dengan capaian 550%
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 9 Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 7 Naskah Kerjasama capaian kinerja 77.77%



- 2 a. Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 Naskah Kerjasama dengan realisasi pada tahun 2022 adalah 7 Naskah Kerjasama dengan capaian 140%. Formulasi perhitungan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu Jumlah Potensi Kerjasama dikalikan 80%;
 - b. Pada Tahun 2023 target Kinerja naik menjadi 6 Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 20 Naskah Kerjasama dengan Capaian Kinerja 333%:

c. Pada Tahun 2024 Indikator Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga telah diganti dengan terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga target kinerja 15 Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 15 Naskah Kerjasama dengan capaian Kinerja 100%.



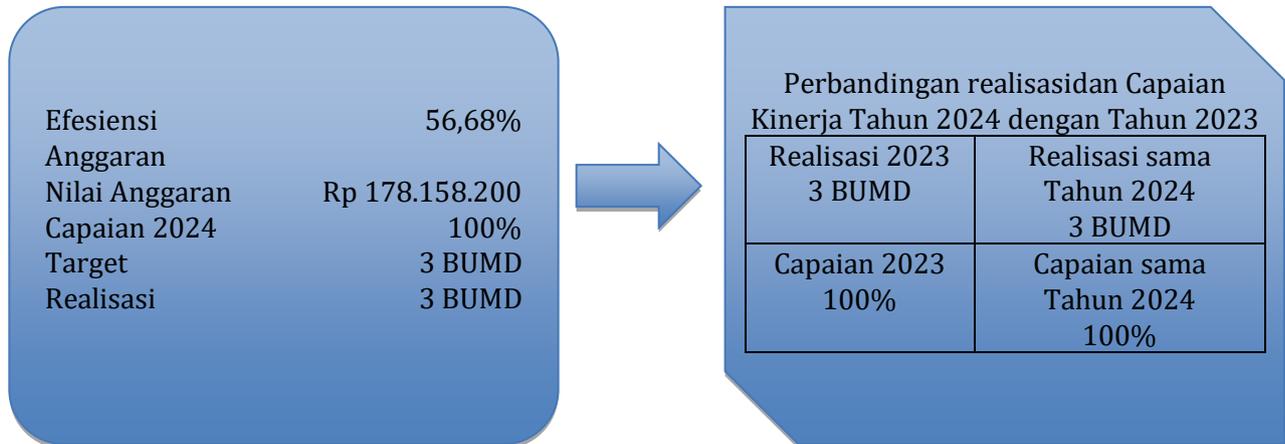
3 a. Indikator Kinerja yang ke empat adalah terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri pada Tahun 2024 telah dihapuskan karena tidak pernah mencapai target, hal ini dikarenakan :

- Kurang dukungan anggaran dalam melakukan peninjauan ke Luar Negeri:
- Kebijakan Pimpinan atau Kepala Daerah lebih memprioritaskan Kerjasama Dalam Negeri.

4 a. Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah tercapainya pembinaan BUMD dengan target 3 (tiga) BUMD pada Tahun 2022. Formulasi perhitungan pembinaan BUMD yaitu Jumlah BUMD; Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan yaitu 3 BUMD yang di bina dengan realisasi 3 (tiga) BUMD dengan capaian 100%;

b. Pada Tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 3 BUMD dan realisasinya adalah 3 BUMD dengan capaian kinerja 100%:

- c. Tahun 2024 target kinerja yang ditetapkan yaitu 3 BUMD dengan realisasi 3 BUMD dengan capaian kinerja 100%.

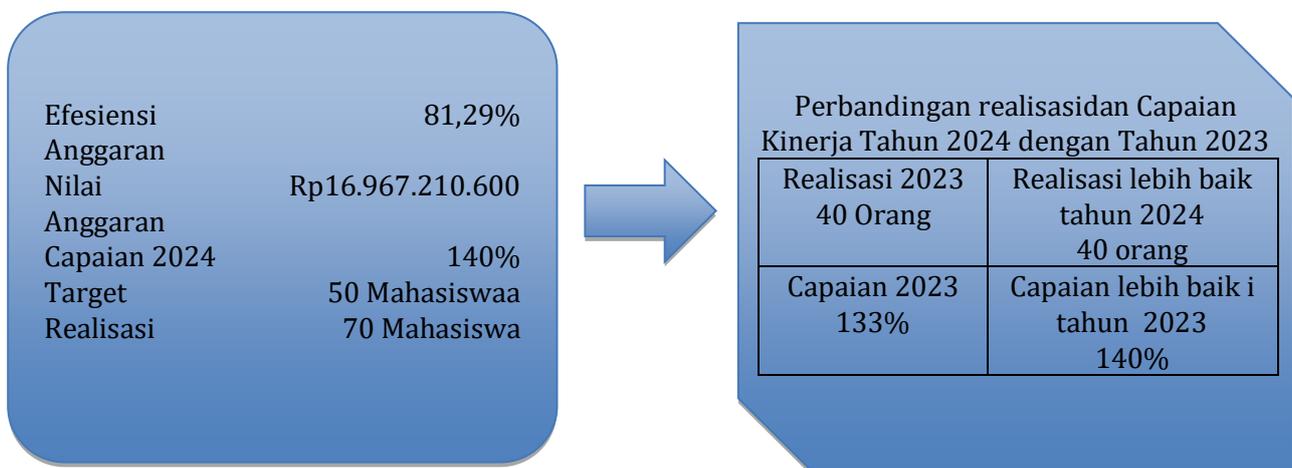


- 5 a. Indikator Kinerja Utama yang keenam adalah Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi. Formulasi Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi yaitu Jumlah Mahasiswa.

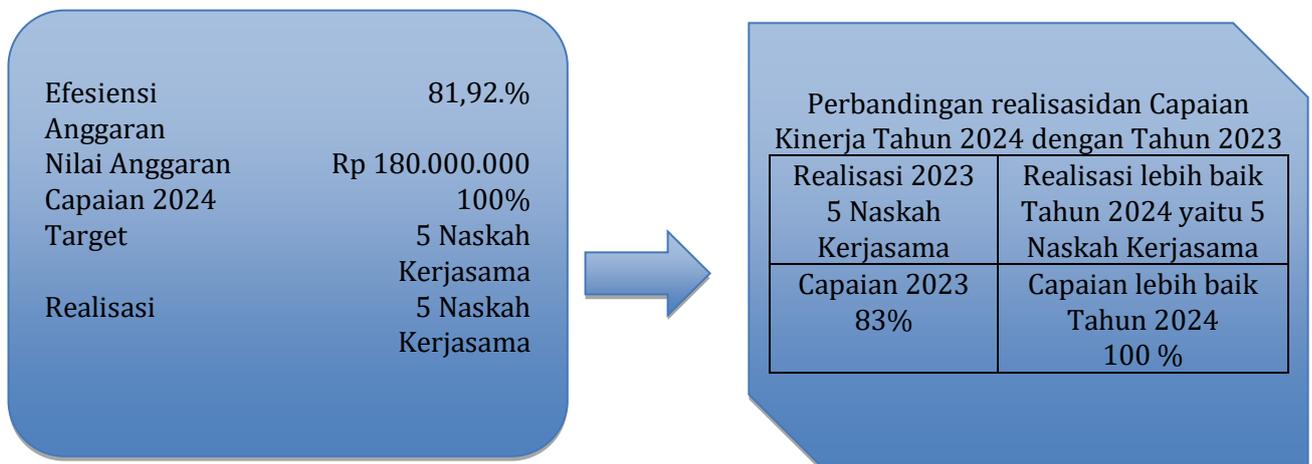
Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebanyak 20 Mahasiswa dengan realisasi 15 Mahasiswa dengan capaian 75%;

- b. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 30 Mahasiswa dan realisasinya adalah 40 Mahasiswa dengan capaian kinerja 133%;

- c. Di Tahun 2024 target kinerja bertambah menjadi 50 Mahasiswa dan realisasinya adalah 70 Mahasiswa dengan capaian kinerja 140%.



- 6 a. Indikator kinerja Utama yang ketujuh adalah Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan dengan target Naskah Kerjasama pada Tahun 2022. Formulasi Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan yaitu Jumlah Target Mahasiswa di bagi dengan 10 Mahasiswa.
- Pada Tahun 2022 target yang di tetapkan sebanyak 5 Naskah Kerjasama dengan realisasi pada Tahun 2022 adalah Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 40%;
- b. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 6 Naskah Kerjasama dan realisasinya adalah 5 Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 83%.
- Tidak tercapainya 100% dikarenakan kebijakan pimpinan yang menentukan untuk melakukan Kerjasama;
- c. Di Tahun 2024 target kinerja turun menjadi 5 Naskah Kerjasama danrealisasinya adalah 5 Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 100%.

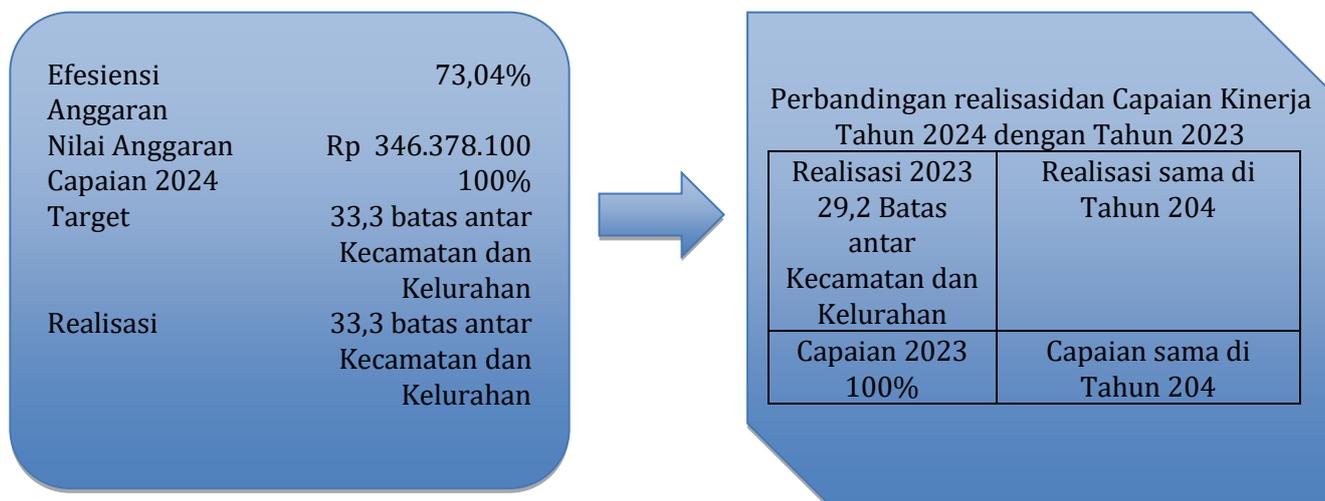


7. a. Indikator Kinerja Utama yang kedelapan adalah Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan target pada Tahun 2022 adalah Batas antar Kecamatan dan Kelurahan berasal dari perhitungan Jumlah Target Penetapan Batas dibagi dengan Jumlah

Segmen dikali 100%.

Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan 25 Persen Batas antar Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi 25Persen Batas antar Kecamatan dan Kelurahan dengan capaian kinerja 100%;

- b. Pada Tahun 2023 target kinerja naik menjadi 29.2Persen Batas antar Kecamatan dan Kelurahan dan realisasinya adalah 29,2 Persen sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100%;
- c. Pada Tahun 2024 target kinerja naik menjadi 33.3 Persen Batas antar Kecamatan dan Kelurahan dan realisasinya adalah 33,3 Persen sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100%;



- 8. a. Indikator Utama kesembilan adalah Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan dengan target 30 Perangkat Daerah pada Tahun 2022 berasal dari perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Dumai.

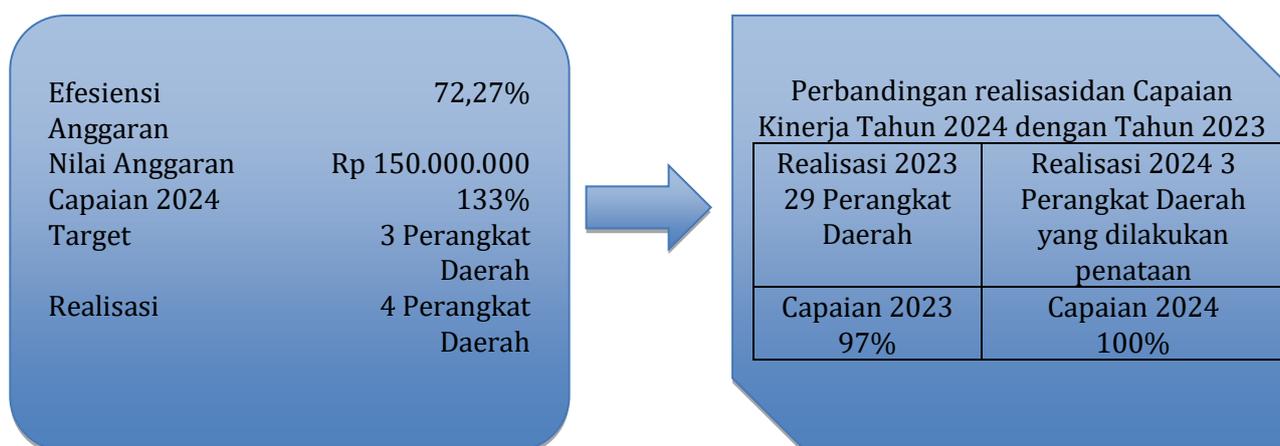
Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan 30 Perangkat Daerah dengan realisasi sebanyak 24 Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 80%;

- b. Pada Tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan sebanyak 30 Perangkat Daerah dan realisasinya adalah 29 Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 97%.

Tidak tercapainya 100% dikarenakan :

- Struktur BPBD tergolong dalam klasifikasi B yang merupakan terdiri dari Kalaksa BPBD, Sekretaris d 3 Kepala Seksi. Karena Struktur tersebut sudah sederhana tidak mungkin dilakukan penyederhanaan lagi.
- BPBD berhubungan langsung dengan Masyarakat sehingga tidak diusulkan untuk penyederhanaan birokrasi.

c. Pada Tahun 2024 Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan menjadi Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan dengan target kinerja menjadi 3 Perangkat Daerah dan realisasinya adalah 4 Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja dapat tercapai 133%.

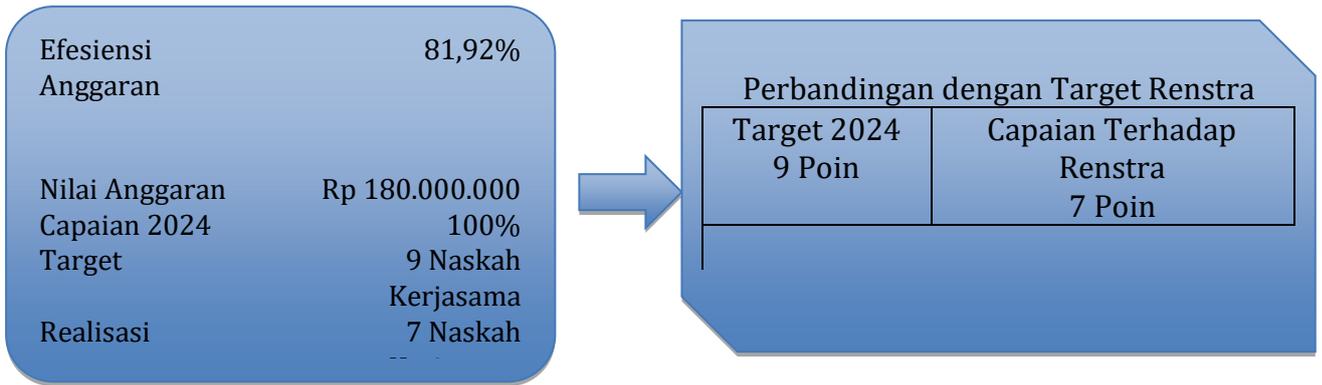


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

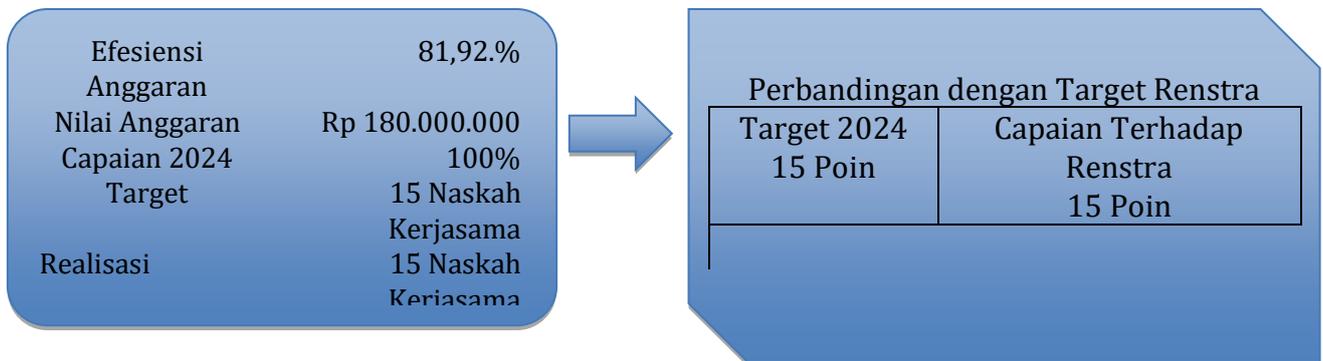
3.3.1. Indikator Kinerja Utama Terlaksananya Kerjasama antar Daerah

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator terlaksananya Kerjasama antar Daerah tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 77.77% dari target Renstra sebesar 9 poin dan terealisasi 7 poin pada tahun 2024



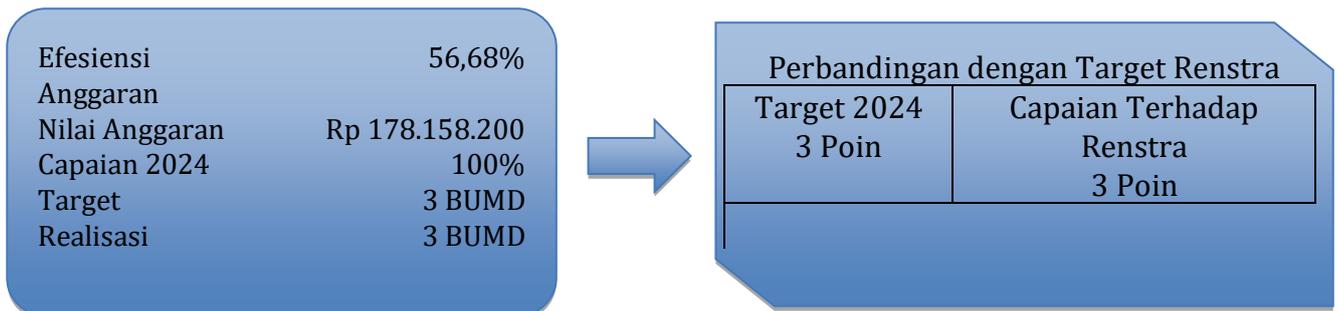
3.3.2. Indikator Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 15 poin dan terealisasi 15 poin pada tahun 2024.



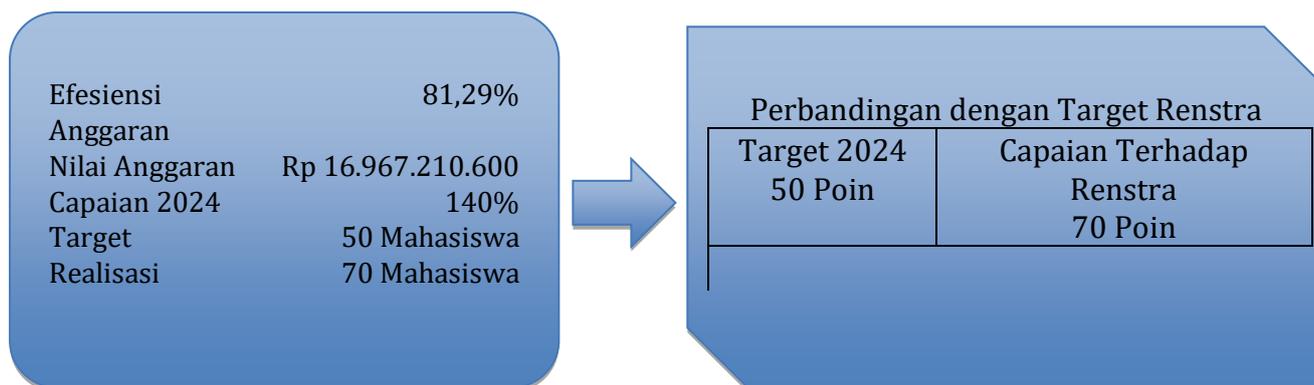
3.3.3. Indikator Tercapainya Pembinaan BUMD

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator tercapainya Pembinaan BUMD tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 3 poin dan terealisasi 3 poin pada tahun 2024.



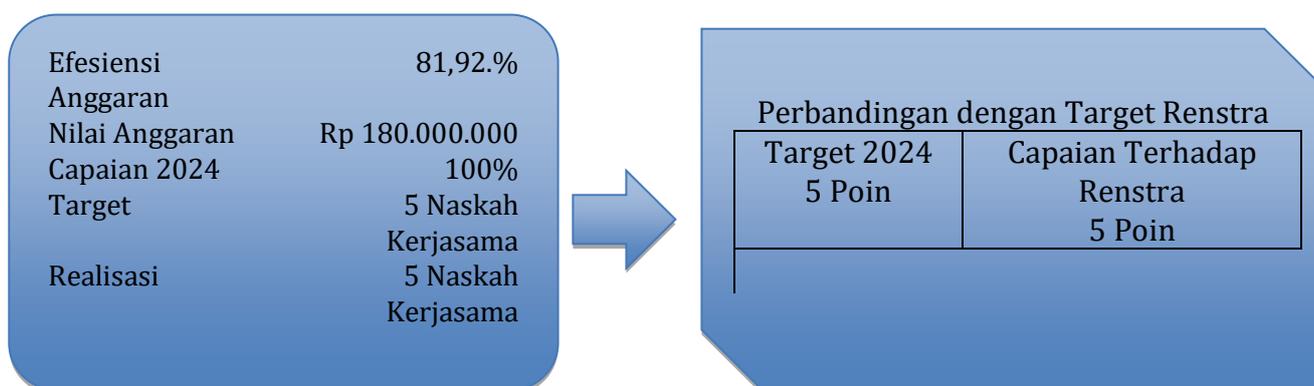
3.3.4. Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 140% dari target Renstra sebesar 50 poin dan terealisasi 70 poin pada tahun 2024.



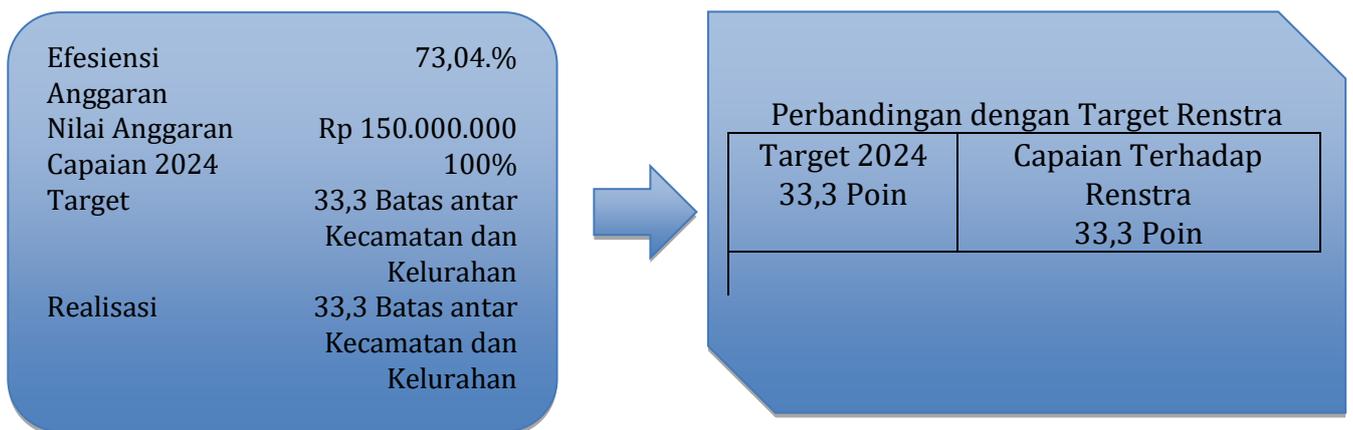
3.3.5. Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 5 poin dan terealisasi 5 poin pada tahun 2024.



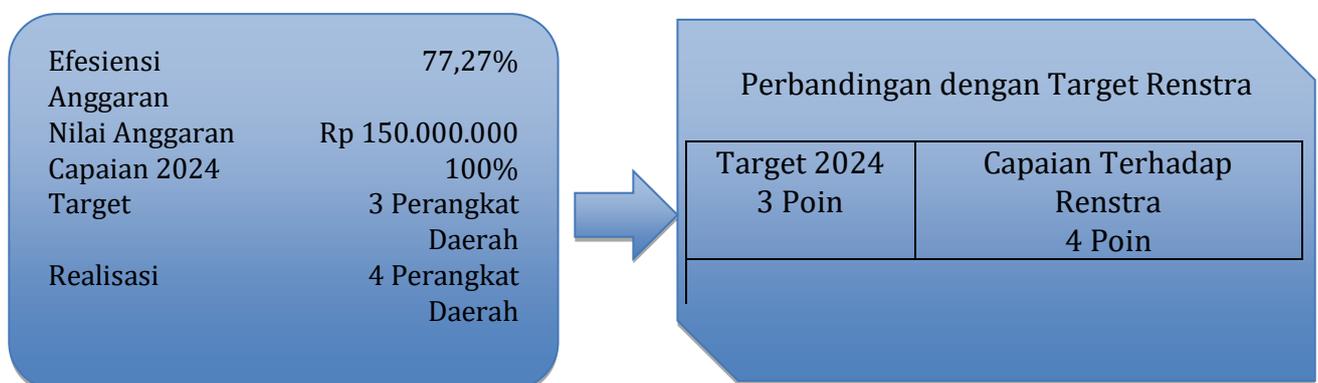
3.3.6. Indikator Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 33,3 poin dan terealisasi 33,3 poin pada tahun 2024.



3.3.7. Indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 133% dari target Renstra sebesar 3 poin dan terealisasi 4 poin pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana table 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 3.Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga	7 15	- -	Tidak ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	-	
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	70	-	
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5	-	
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33,3	-	
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	4	-	

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator terlaksananya Kerjasama antar Daerah

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator terlaksananya Kerjasama antar Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 9 Naskah Kerjasama realisasi sebesar 11 Naskah Kerjasama, tercapai 77.77% atau bernilai kinerjatinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7 Naskah Kerjasama .atau tercapai sebesar 550%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 472.2%
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** terlaksananya Kerjasama antar Daerah melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Dukungan dan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) terhadap inovasi daerah yang menjadi potensi dan program prioritas
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama antar Daerah adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mengakomodir kegiatan, koordinasi dan konsolidasi terkait fasilitasi rencana Kerjasama;
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk Analis Kerjasama Dalam Negeri;
 - Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam memahami Kerjasama Dalam Negeri (Rehulasi Tata Cara dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri).
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama antar Daerah adalah sebagai berikut:
 - Dukungan anggaran yang optimal;
 - Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kerjasama Dalam Negeri yang Kompeten;
 - Peningkatan Pemahaman Perangkat Daerah terkait Regulasi

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis atau Sosialisasi.

2. Indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga

a. **Capaian kinerja** untuk indikator terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga menunjukkan capaian target yang telah ditetapkan tercapai. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 15 Naskah Kerjasama realisasi sebesar 15 Naskah Kerjasama, tercapai 100% atau bernilai kinerjasangat tinggi.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Dukungan dan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) terhadap inovasi daerah yang menjadi potensi dan program prioritas

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mengakomodir kegiatan, koordinasi dan konsolidasi terkait fasilitasi rencana Kerjasama;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk Analis Kerjasama Dalam Negeri;
- Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam memahami Kerjasama Dalam Negeri (Rehulasi Tata Cara dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri).

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

- Dukungan anggaran yang optimal;
- Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kerjasama Dalam Negeri yang Kompeten;

- Peningkatan Pemahaman Perangkat Daerah terkait Regulasi Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri melalui Bimbingan Teknis atau Sosialisasi.

3. Indikator tercapainya Pembinaan BUMD

- a. Capaian kinerja** untuk indikator tercapainya Pembinaan BUMD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3 BUMD realisasi sebesar 3 BUMD, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Sama dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3 BUMD atau tercapai sebesar 100%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** tercapainya Pembinaan BUMD sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah Korporatifnya Direksi BUMD.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator** tercapainya Pembinaan BUMD adalah sebagai berikut :
 - Faktor external Perusahaan;
 - Ada hutang periode kepengurusan lama sehingga Perusahaan dalam keadaan sakit;
 - PT Pembangunan Dumai masih dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa menyumbangkan PAD.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator** tercapainya Pembinaan BUMD adalah sebagai berikut :
 - Menyarankan kepada Direksi PT. Pembangunan Dumai agar bisa mencari investor untuk mendukung bisnis;
 - Pembinaan BUMD hanya sebatas pembinaan terkait peraturan dan tata Kelola BUMD tidak masuk dalam ranah kerja dan keuangan BUMD.

4. Indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 50 Mahasiswa, realisasi sebesar 70 Mahasiswa tercapai 140% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 70 Mahasiswa atau tercapai sebesar 133%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 7%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi melebihi target yang telah ditentukan adalah adanya ketersediaan anggaran APBD
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi adalah keterbatasan anggaran
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi adalah Perlunya meningkatkan Alokasi Dana APBD untuk beasiswa

5. Indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 5 Naskah Kerjasama, realisasi sebesar 5 Naskah Kerjasama tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 5 Naskah Kerjasama atau tercapai sebesar 83%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 17%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Adanya ketersediaan anggaran;
 - Adanya minat dari siswa.

- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan adalah Kebijakan pimpinan yang menentukan untuk melakukan Kerjasama.
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - Melakukan Survey pada Institusi/Lembaga Pendidikan untuk melakukan Kerjasama;
 - Menyampaikan pada pimpinan hasil survey.
6. Indikator Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 33,3% Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan realisasi sebesar 33,3% Tapal Batas antar Kecamatan dan Kelurahan tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Sama dengan realisasi tahun 2023 yakni tercapai 100%.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah adanya dukungan dari pimpinan.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut :
 - Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan;
 - Masih banyak segemn batas, baik antar Kelurahan atau antar Kecamatan yang masih maya dengan medan dilapangan yang berta untuk dijajaki;
 - Masih kurang memadai Sumber Daya Manusia (SDM).
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah

Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Perlunya penambahan anggaran untuk perapatan Pilar Batas yang masih maya;
- Perlunya pelatihan datau Diklat Teknis.

7. Indikator Meningkatnya Penataan Organisasi

- Capaian kinerja** untuk meningkatnya Penataan Organisasi menunjukkan capaian target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3 Perangkat Daerah, realisasi sebesar 4 Perangkat Daerah tercapai 133% atau bernilai kinerja sangat tinggi.
- Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan melebihi dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Komitmen pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan;
 - Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan;
 - Adanya koordinasi/kolaborasi yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
- Faktor penghambat Capaian Indikator** Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan adalah sebagai berikut :
 - Belum mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif;
 - Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah terhadap kebutuhan organisasinya
- Tindak lanjut Capaian Indikator** Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan panataan adalah sebagai berikut :
 - Meningkatnya kompetensi ASN dengan melalui Diklat (disetiap Perangkat Daerah);
 - Perlu adanya dukungan tambahan ASN yang berkualitas;
 - Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait seperti instansi/Lembaga/ Kementrian.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.1 .Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	realisasi(Rp)	Capaian anggaran (%)
1	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 380.000.000	Rp 308.670.000	81,23%
2	Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 380.000.000	Rp 308.670.000	82.23%
3	Tercapaiannya Pembinaan BUMD	Peningkatan capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	3	3	Dokumen	Rp 549.992.100	Rp 366.519.300	66,64%
4	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 72.217.000.000	Rp 59.189 221 859	81,96%

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	realisasi(Rp)	Capaian anggaran (%)
5	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 380.000.000	Rp 308.670.000	81,23%
6	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Peningkatan capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	Dokumen	Rp 550.000.000	Rp 484.533.195	88,10%
7	Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang disederhanakan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	6	Dokumen	Rp 750.000.000	Rp 548.812.541	73,18%

3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1. Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	77.77%	81,92%
		2. Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga	100%	81.92%
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	100%	56,68%
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	140%	81,29%
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	100%	81,92%
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	100%	73,04%
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	133%	77,27%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu* Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah tingkat efisiensinya adalah 0.94 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (77.77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu* Terlaksananya Kerja sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak ketiga tingkat efisiensinya adalah 2,04 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu* tercapainya Pembinaan BUMD tingkat efisiensinya adalah 1,76 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,68%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4 yaitu* Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa berprestasitingkat efisiensinya adalah 1,72 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (140%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 5 yaitu* Jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan tingkat efisiensinya adalah 1,22 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada *Indikator Kinerja Utama 6 yaitu* Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah 1,37 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73,04%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- f. Pada *Indikator Kinerja Utama 7* yaitu Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan penataan adalah 1,72 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (133%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,27%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	1 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah		
	1 Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 180.000.000	Rp 147.450.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan		
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
	Sub Kegiatan Koordinasi Sikronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 178.158.200	Rp 100.972.100
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 16.967.210.600	Rp 13.791.865.559
4.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		

		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 180.000.000	Rp 147.450.000
5.		Program Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat		
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 150.000.100	Rp 109.553.340
6..		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Penataan Organisasi		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 150.000.000	Rp 115.907.284

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Kedua RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dengan kesesuaian RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, Dokumen RKPD Tahun 2023, Capai IKU Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai yang terdiri dari 6 (enam) Kinerja Utama dengan 7 (delapan) Indikator Kinerja sasaran dengan hasil sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Indikator 1, Terlaksananya Kerjasama antar Daerah dengan target 9 (sembilan) naskah kerjasama, realisasinya adalah 11 (sebelas) Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 122%.
2. Indikator 2, Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga dengan target 15 (lima belas) Naskah Kerjasama dan realisasinya 25 (dua puluh lima) Naskah Kerjasama dengan capaian kinerja 167%.
3. Indikator 3, Tercapainya Pembinaan BUMD mencapai target 100% yaitu dengan 3 BUMD yang dilakukan pembinaan.
4. Indikator 4, Mahasiswa berprestasi yang memperoleh beasiswa dengan target 50 (lima puluh) orang pencapaiannya melebihi dari target yaitu 70 (tujuh puluh) orang dengan capaian kinerja 133%
5. Indikator 5, Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan yang di target 5 (lima) Naskah Kerjasama terealisasi sebanyak 5 (lima) Naskah Kerjasama atau dengan capaian kinerja 100%
6. Indikator 6, capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan target 33.3 % terlaksana 100%
7. Indikator 7, Jumlah Struktur Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan dengan target 3 Perangkat Daerah yang terealisasi sebanyak 4 Perangkat Daerah atau dengan capaian kinerja 133%.

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

Diharapkan Pimpinan dapat lebih dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Dumai sertam eningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 31 Januari 2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

H. INDRA GUNAWAN, S. IP., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19651007 198603 1 009

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu
 Misi : 1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industry;
 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
 3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik.

Sasaran : 1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri;
 2. Menghasilkan PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD
 3. Meningkatkan Pendidikan bagi Masyarakat kurang mampu yang berprestasi ;
 4. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan;
 5. Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
 6. Meningkatkan Penataan Organisasi.

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET					
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET							URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISIAWAL		TARGET						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KET				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	Jumlah Potensi Kerjasama		NA	8	10	0	0	0	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	Jumlah Potensi Kerjasama OPD x 30%		NA	2	2	0	0	0	Meningkatkan Kerjasama Dalam Negeri	Menetapkan target pelaksanaan Kerja Dalam Negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
																			2				2	9	10	11		
														NA	0	0	15	20	25									

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RIGHTSIZING)	Jumlah Perangkat Daerah x 25% / 3		NA	30	30	0	0	0	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	Jumlah Perangkat Daerah x 25% / 3		NA	30	30	0	0	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; 2. Pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien; 3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Standar Pelayanan Pemerintah; 3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan tepat ukur; 4. Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah; 5. Penerapan hasil anjab dan ABK dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 6. Peningkatan kompetensi aparatur penyusunan LKjIP; 7. Monitoring dilakukan secara teratur dan dilakukan evaluasi dan koordinasi, apabila kegiatan tidak sesuai spesifikasi dilapangan dengan pengelola kegiatan dan instansi terkait; 8. Penerapan 	Program Penunjang urusan Pemerintahan
--	--	-----------------------------------	--	----	----	----	---	---	---	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	----	----	----	---	---	---	--	---	---------------------------------------

**RENCANA AKSI
TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Naskah Kerjasama	9		✓	✓	✓	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	61,475,119,300
		Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga	Naskah Kerjasama	15		✓	✓	✓	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah / BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	3			✓		Program Perekonomian Dan Pembangunan	meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	2,011,392,100
3	meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	50		✓	✓		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	61,475,119,300
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Institusi / Lembaga Pendidikan	Naskah Kerjasama	5		✓	✓		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan	%	61,475,119,300
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	%	33.30				✓	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengelolaan perbatasan di Kota Dumai	%	61,475,119,300
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	PD	3				✓	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	%	43,511,113,503
											Jumlah	106,997,624,903


SEKRETARIS DAERAH,
H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
 NIP. 19651007 198603 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. PAISAL, SKM, MARS



H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP.19651007 198603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Sasaran (3)	Target (4)
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	- Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah - Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga Tercapainya Pembinaan BUMD	9 Naskah Kerjasama 15 Naskah Kerjasama 3 BUMD
2	Menghasilkan PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD		
3	meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	50 Mahasiswa
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Institusi / Lembaga Pendidikan	5 Naskah Kerjasama
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33,30%
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	3 Perangkat Daerah

Program

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	43.511.113.503,00	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	61.475.119.300,00	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.011.392.100,00	

Keterangan



Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA



H. PAISAL, SKM, MARS

H. ANDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19661007 198603 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **H. INDR A GUNAWAN, S.IP, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak** Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dumai, 24 September 2024
PIHAK PERTAMA

H. PAISAL, SKM, MARS

H. INDR A GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP.19651007 198603 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga dalam dan Luar Negeri	- Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah - Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan Pihak Ketiga Tercapainya Pembinaan BUMD	9 Naskah Kerjasama 15 Naskah Kerjasama 3 BUMD
2	Menghasilkan PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	50 Mahasiswa
3	Meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	Jumlah Kerja Sama Daerah dengan Institusi / Lembaga Pendidikan	5 Naskah Kerjasama
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33,30%
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Jumlah Struktur Organisasi yang dilakukan penataan	3 Perangkat Daerah
6	Meningkatnya Penataan Organisasi		

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 61.132.322.581,00	-
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 72.922.619.873,00	-
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.420.992.100,00	-
Jumlah	Rp 137.475.934.554,00	

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI

Dumai, 24 September 2024

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH,

H. PAISAL, SKM, MARS

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.SI
NIP. 19651007 198603 1 003

**EVALUASI TERHADAP KINERJA DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
Sampai dengan 31 Desember 2024**

No	Susunan	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp	9		10		11		12		K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		4 1	SEKRETARIAT DAERAH			139.075.034.554,00	0,14	25.124.927.156,00	0,18	39.889.956.950,00	0,20	23.719.333.828,00	0,41	25.378.028.488,00	0,94	114.112.246.422,00	16	17
		4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (mengikuti RPJMD)	100 %	61.938.422.581,00	0,15	9.505.769.341,00	0,17	15.559.399.061,00	0,21	13.073.120.713,00	0,38	13.410.167.843,00	0,91	51.548.456.958,00		
		4 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	149.900.600,00	0,11	22.185.050,00	0,16	6.041.900,00	0,09	9.177.650,00	0,63	41.915.629,00	1,00	79.320.229,00		
		4 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	59.523.000,00	0,18	10.962.250,00	0,00	-	0,12	7.286.200,00	0,69	600.000,00	1,00	18.848.450,00		Tidak adanya uang di Kas Bendahara SPM TU (Rp 1,141,800)
		4 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.699.200,00	-	-	0,00	-	0,33	1.542.200,00	0,67	-	1,00	1.542.200,00		Salah penganggaran
		4 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.707.200,00	-	-	0,74	4.246.700,00	0,00	-	0,26	-	1,00	4.246.700,00		SPM TU (Rp 706.750)
		4 1 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.217.100,00	0,34	8.669.800,00	0,07	1.795.200,00	0,00	-	0,59	-	1,00	10.465.000,00		Tidak adanya uang di Kas Bendahara
		4 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	54.754.100,00	0,05	2.553.000,00	0,00	-	0,01	349.250,00	0,95	41.315.629,00	1,00	44.217.879,00		SPM TU (Rp 2,500,000)
		4 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		20.914.392.521,00	0,27	3.491.357.430,00	0,18	7.055.322.859,00	0,39	4.563.449.712,00	0,15	5.326.395.993,00	1,00	20.436.525.994,00		
		4 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	20.687.936.621,00	0,17	3.443.182.230,00	0,34	7.013.974.959,00	0,22	4.467.856.212,00	0,28	5.310.644.893,00	1,00	20.235.658.294,00		SPM TU (Rp 16,940,000)
		4 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	104.974.900,00	0,11	12.000.000,00	0,24	25.325.200,00	0,40	41.953.000,00	0,24	7.113.400,00	1,00	86.391.600,00		Tidak adanya uang di Kas Bendahara SPM TU (Rp 3,500,000)
		4 1 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	35.566.000,00	0,35	12.384.400,00	0,04	1.320.000,00	0,59	20.980.000,00	0,02	-	1,00	34.684.400,00		
		4 1 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	67.519.200,00	0,21	14.250.000,00	0,19	12.887.700,00	0,38	25.970.500,00	0,21	8.637.700,00	1,00	61.745.900,00		SPM TU (Rp 4,250,000)

				4	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	18.395.800,00	0,52	9.540.800,00	0,10	1.815.000,00	0,36	6.690.000,00	0,02	-	1,00	18.045.800,00
				4	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai			132.557.900,00	0,14	17.920.000,00	0,30	30.041.700,00	0,13	16.832.400,00	0,43	18.379.700,00	1,00	83.173.800,00
				4	1	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	112.949.600,00	0,13	15.130.000,00	0,20	22.172.100,00	0,12	14.042.400,00	0,55	18.379.700,00	1,00	69.724.200,00
				4	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	19.608.300,00	0,14	2.790.000,00	0,40	7.869.600,00	0,14	2.790.000,00	0,31	-	1,00	13.449.600,00
				4	1	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Daerah			380.837.600,00	0,25	92.303.290,00	0,21	88.970.099,00	0,09	19.760.000,00	0,25	61.081.280,00	0,80	262.114.669,00
				4	1	1	2,1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	52.680.000,00	0,22	11.500.000,00	0,20	10.500.000,00	0,20	10.500.000,00	0,38	11.840.000,00	1,00	44.340.000,00
				4	1	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	136.000.000,00	0,40	55.000.000,00	0,09	11.875.000,00	0,03	3.500.000,00	0,00	-	0,52	70.375.000,00
				4	1	1	2,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	192.157.600,00	0,13	25.803.290,00	0,35	66.595.099,00	0,03	5.760.000,00	0,37	49.241.280,00	0,88	147.399.669,00
				4	1	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.269.993.476,00	0,12	1.419.557.796,00	0,15	1.932.987.543,00	0,24	1.843.036.821,00	0,29	1.692.192.619,00	0,81	6.887.774.779,00
				4	1	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.000.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	1,00	-	
				4	1	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4.132.719.801,00	0,18	756.709.100,00	0,19	798.693.000,00	0,11	454.138.300,00	0,50	805.429.800,00	0,99	2.814.970.200,00
				4	1	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	628.209.698,00	0,14	89.572.000,00	0,18	116.009.000,00	0,19	122.089.500,00	0,48	46.408.500,00	1,00	374.079.000,00
				4	1	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	149.908.977,00	-	-	0,00	-	0,58	86.680.000,00	0,25	39.167.000,00	0,90	125.847.000,00
				4	1	1	2,1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	529.655.000,00	0,11	56.572.000,00	0,20	107.508.000,00	0,31	161.957.000,00	0,31	33.865.000,00	0,93	359.902.000,00
				4	1	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	3.494.600.000,00	0,13	454.604.696,00	0,24	853.177.543,00	0,27	960.572.021,00	0,25	728.922.319,00	0,90	2.997.276.579,00
				4	1	1	2,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	234.900.000,00	0,26	62.100.000,00	0,25	57.600.000,00	0,25	57.600.000,00	0,25	38.400.000,00	1,00	215.700.000,00
				4	1	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.405.531.448,00	-	-	0,00	-	0,00	0,95	1.169.995.000,00	0,95	1.169.995.000,00	
				4	1	1	2,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	3.405.531.448,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,95	1.169.995.000,00	0,95	1.169.995.000,00

Tidak adanya uang di Kas Bendahara SPM TU (Rp 15,071,500)
SPM TU (Rp 1,257,500)
SPM TU (Rp 8,345,000)
Tidak adanya uang di Kas Bendahara
Tidak adanya uang di Kas Bendahara
SPM LS (Rp. 99.144,250)
SPM LS Rp. 1.172.125,200
SPM TU (Rp 121,666,500)
Tidak adanya uang di Kas Bendahara
SPM TU (Rp 76,008,000)
SPM TU (Rp 345,816,742)
SPM TU (Rp 19,200,000)
SPM LS Hibah (Rp. 1.214.100,000)

4	1	1	2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.105.565.048,00	0,36	1.813.812.769,00	0,12	1.871.487.914,00	0,32	1.626.398.316,00	0,19	1.530.734.931,00	0,99	6.842.433.930,00	
4	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	62.250.000,00	1,00	62.250.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	62.250.000,00	
4	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	5.587.723.513,00	0,22	1.228.188.269,00	0,24	1.343.889.414,00	0,18	1.022.922.536,00	0,36	1.049.177.931,00	4.644.178.150,00
4	1	1	2,1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diaednakan	1	Laporan	89.129.135,00	-	-	0,00	-	0,87	77.700.000,00	0,13	77.700.000,00	
4	1	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.366.462.400,00	0,22	523.374.500,00	0,22	527.598.500,00	0,22	525.775.780,00	0,28	481.557.000,00	2.058.305.780,00
4	1	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			7.514.366.500,00	0,16	1.018.713.662,00	0,22	1.846.336.066,00	0,18	1.237.736.320,00	0,43	902.012.446,00	5.004.798.494,00
4	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	349.836.000,00	0,18	64.131.872,00	0,19	65.250.000,00	0,18	64.084.000,00	0,44	24.350.000,00	217.815.872,00
4	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	60	Unit	1.666.101.010,00	0,22	368.319.000,00	0,24	404.247.370,00	0,20	332.986.000,00	0,33	306.292.446,00	1.411.844.816,00
4	1	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300	Unit	408.335.750,00	0,12	48.730.000,00	0,18	72.394.000,00	0,17	70.485.000,00	0,51	91.490.000,00	283.099.000,00
4	1	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	5.090.093.740,00	0,11	537.532.790,00	0,26	1.304.444.696,00	0,15	770.181.320,00	0,44	479.880.000,00	3.092.038.806,00
4	1	1	2,1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.233.697.068,00	0,09	268.439.794,00	0,11	281.093.616,00	0,34	321.737.757,00	0,22	266.439.757,00	1.137.710.924,00
4	1	1	2,1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	186.184.068,00	0,10	19.439.794,00	0,17	32.093.616,00	0,12	21.439.757,00	0,61	17.439.757,00	90.412.924,00
4	1	1	2,1	2	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2	Paket	51.513.000,00	-	-	0,00	-	1,00	51.298.000,00	-	51.298.000,00	
4	1	1	2,1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Orang	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4	1	1	2,1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	996.000.000,00	0,25	249.000.000,00	0,25	249.000.000,00	0,25	249.000.000,00	0,25	249.000.000,00	996.000.000,00

SPM TU (Rp 9.000.000)
SPM LS Rp. 66.000.000

SPM TU (Rp79.000.000)

SPM TU (Rp 36.475.500)

SPM TU (Rp 36.740.000)

SPM TU (Rp 183.950.000)

SPM TU (Rp 14.750.000)

SPM TU Rp 209.677.000
SPM LS Rp. 1.578.713.850

S
e
k
r
e
t
a

4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	1	Dokumen	200.000.000,00	0,45	90.561.134,00	0,42	84.680.071,00	0,00	0,12	23.644.050,00	1,00	198.885.255,00	
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat			72.217.000.000,00	0,19	14.972.056.681,00	0,30	23.508.561.648,00	0,13	9.704.284.931,00	0,37	11.295.028.559,00	1,00	59.479.931.819,00
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	1	Dokumen	25.728.331.400,00	0,21	5.362.918.931,00	0,47	12.086.627.648,00	0,09	2.256.799.226,00	0,23	1.208.990.355,00	1,00	20.915.336.160,00
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dokumen	29.521.458.000,00	0,28	8.197.247.750,00	0,32	9.428.259.000,00	0,17	5.146.319.000,00	0,23	2.003.904.350,00	1,00	24.775.730.100,00
4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Dokumen	16.967.210.600,00	0,08	1.411.890.000,00	0,12	1.993.675.000,00	0,14	2.301.166.705,00	0,66	8.082.133.854,00	1,00	13.788.865.559,00
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				468.619.873,00	0,17	71.910.000,00	0,18	74.499.730,00	0,25	120.696.750,00	0,40	69.320.000,00	1,00	336.426.480,00
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Daerah yang di susun	1	Dokumen	192.851.500,00	0,15	19.850.000,00	0,17	22.321.730,00	0,31	42.136.750,00	0,37	29.980.000,00	1,00	114.288.480,00
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	6	Kasus	158.870.000,00	0,22	34.430.000,00	0,19	30.538.000,00	0,28	60.390.000,00	0,31	5.920.000,00	1,00	131.278.000,00
4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1	Dokumen	116.898.373,00	0,15	17.630.000,00	0,19	21.640.000,00	0,16	18.170.000,00	0,51	33.420.000,00	1,00	90.860.000,00
4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah				380.000.000,00	0,10	32.880.000,00	0,15	54.540.000,00	0,20	73.530.000,00	0,55	147.720.000,00	1,00	308.670.000,00
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	1	Dokumen	180.000.000,00	0,04	7.180.000,00	0,13	22.640.000,00	0,17	31.000.000,00	0,66	86.630.000,00	1,00	147.450.000,00
4	1	2	2	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	1	Dokumen	100.000.000,00	0,11	10.620.000,00	0,16	16.290.000,00	0,19	18.880.000,00	0,54	47.370.000,00	1,00	93.160.000,00
4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan	1	Laporan	100.000.000,00	0,15	15.080.000,00	0,16	15.610.000,00	0,24	23.650.000,00	0,46	13.720.000,00	1,00	68.060.000,00
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan			3.520.992.100,00	0,12	435.740.000,00	0,16	574.796.440,00	0,16	555.535.834,00	0,46	388.155.696,00	0,90	1.954.227.970,00
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian			549.992.100,00	0,10	56.450.000,00	0,16	86.960.000,00	0,27	149.206.800,00	0,47	73.903.500,00	1,00	366.520.300,00

SPM LS Rp. 711.875.000
SPM TU Rp. 784.054.671
SPM TU Rp. 183.200.000

SPM LS Rp. 282.750.000
SPM TU Rp. 2.174.776.144
SPM TU Rp. 15.250.000

SPM TU Rp. 292.411.527
SPM TU Rp. 9.750.000

SPM TU (Rp 10,242,700)

SPM TU (Rp 11.380,000)

SPM TU (Rp 15,820,000)

SPM TU (Rp 11,976,000)

SPM TU (Rp 3,030,000)

SPM TU (Rp 13,537,000)

4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Dokumen	178.158.200,00	0,02	3.530.000,00	0,16	29.210.000,00	0,21	36.600.000,00	0,61	31.632.100,00	1,00	100.972.100,00	SPM TU (Rp 43,410,525)
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	1	Laporan	177.690.200,00	0,13	23.840.000,00	0,18	32.620.000,00	0,24	42.890.000,00	0,44	21.002.100,00	1,00	120.352.100,00	SPM TU (Rp 20,839,752)
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	194.143.700,00	0,15	29.080.000,00	0,13	25.130.000,00	0,36	69.716.800,00	0,36	21.269.300,00	1,00	145.196.100,00	SPM TU (Rp 92,415,700)
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan			1.150.000.000,00	0,06	60.730.000,00	0,09	90.210.000,00	0,13	133.194.234,00	0,54	68.408.216,00	0,81	352.542.450,00	
4	1	3		1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	578.858.900,00	0,05	26.350.000,00	0,06	32.110.000,00	0,09	50.005.269,00	0,74	28.315.000,00	0,93	136.780.269,00	SPM TU (Rp 18.340.000)
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	266.398.600,00	0,06	16.350.000,00	0,16	42.300.000,00	0,13	33.980.000,00	0,27	21.130.000,00	0,62	113.760.000,00	SPM TU (Rp 72.181.900)
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	304.742.500,00	0,06	18.030.000,00	0,05	15.800.000,00	0,16	49.208.965,00	0,60	18.963.216,00	0,87	102.002.181,00	SPM TU (Rp 112.440.000)
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai			1.521.000.000,00	0,16	272.750.000,00	0,26	320.626.440,00	0,11	198.544.800,00	0,47	182.323.980,00	1,00	974.245.220,00	
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen	658.000.000,00	0,04	29.000.000,00	0,07	46.220.000,00	0,14	94.490.000,00	0,74	77.561.580,00	1,00	247.271.580,00	SPL LS Rp. 72.650.000
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	713.000.000,00	0,32	227.250.000,00	0,30	212.327.000,00	0,13	95.104.800,00	0,25	79.322.200,00	1,00	614.004.000,00	SPM TU Rp. 27.750.000
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	Orang	150.000.000,00	0,11	16.500.000,00	0,11	62.079.440,00	0,06	8.950.000,00	0,42	25.440.200,00	1,00	112.969.640,00	
4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam			300.000.000,00	0,15	45.810.000,00	0,26	77.000.000,00	0,25	74.590.000,00	0,34	63.520.000,00	1,00	260.920.000,00	
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	Dokumen	100.000.000,00	0,18	18.480.000,00	0,27	27.000.000,00	0,20	20.030.000,00	0,34	23.190.000,00	1,00	88.700.000,00	SPM TU Rp. 9.690.000
4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	Dokumen	100.000.000,00	0,24	24.180.000,00	0,33	32.750.000,00	0,26	25.520.000,00	0,18	15.780.000,00	1,00	98.230.000,00	900000

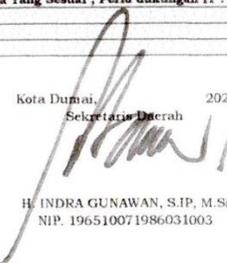
4	1	3	2	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan dibidang energi dan air	1 Dokumen	100.000.000,00	0,03	3.150.000,00	0,17	17.250.000,00	0,29	29.040.000,00	0,51	24.550.000,00	1,00	73.990.000,00	3150000
JUMLAH								139.075.034.554,00		25.124.927.156,00		39.889.956.950,00		23.719.333.828,00		25.378.028.488,00		114.112.246.422,00	
								Rata-rata Capaian Kinerja (%)	14,36%	18,07%	18,23%	28,68%	20,0%	17,06%	41,11%	18,25%	94,13%	82,05%	
								Prdikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : **Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Bagian, Meningkatkan Kualitas SDM, Menyusun lebih detail lagi setiap Anggaran Kegiatan agar Sesuai dengan Penganggaran, serta Menetapkan Standar Harga Yang Sesuai, Perlu dukungan IT.**
Faktor penghambat pencapaian kinerja : **Kurangnya Koordinasi Yang Baik Antar Bagian, Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran serta Kelancaran Pada SIPD**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwul : **Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Target**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD : **Perlu evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap bagian.**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% < 100%	Sangat tinggi
(2)	76% < 90%	Tinggi
(3)	66% < 75%	Sedang
(4)	51% < 65%	Rendah
(5)	< 50%	Sangat Rendah

Kota Dumai, 2025

Sekretaris Daerah



H. INDRA GUNAWAN, S.I.P, M.Si
NIP. 196510071986031003

